

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era post-truth menjadikan Nabi Muhammad sebagai model etika pemerintahan dalam tata pemerintah sangat penting. Hal ini disebabkan oleh semakin deras nya arus globalisasi yang seringkali merusak tatanan moral dan mengaburkan standar kebenaran. Post-truth adalah kondisi di mana emosi dan opini lebih berpengaruh daripada fakta, sehingga nilai-nilai etis dalam pemerintahan rentan terkikis oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Era pasca-kebenaran ditandai dengan krisis otoritas di berbagai bidang, termasuk agama.¹ Dimana kebenaran tidak lagi menjadi fokus utama yang dicari dalam setiap proses pertukaran informasi satu sama lain.² Di tengah gempuran informasi yang tidak selalu berlandaskan kebenaran, figur Nabi Muhammad menawarkan model kepemimpinan yang kuat dalam hal kejujuran, amanah, dan keadilan. Beliau menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, dengan prinsip kepemimpinan yang menegaskan kejujuran dan transparansi, suatu hal yang semakin dibutuhkan saat ini.

Mengadopsi etika kepemimpinan Nabi Muhammad dalam tata pemerintah dapat menjadi jawaban atas degradasi moral dalam pemerintahan

¹ Muhammad Taufiq et al., "Tengka, Identity Politics, and the Fiqh of Civilization: The Authority of Madura's Kiai in the Post-Truth Era," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 24, no. 1 (2024): 139–65, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v24i1.139-165>.

² Herman Purba and Fitzgerald Kennedy Sitorus, "Truth, Post Truth, Dan Dinamikanya Di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur," *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* 10, no. 1 (2023): 1–16, <https://doi.org/10.31571/sosial.v10i1.5001>.

serta menginspirasi pembentukan tata kelola yang lebih berintegritas, adil, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Di era yang penuh tantangan ini, model etika yang konsisten dengan nilai-nilai universal seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dapat memperkuat landasan moral fiqih tata negara Indonesia dan membantu menjaga pemerintahan yang berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Beberapa penelitian mengkaji model kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh yang sangat relevan dalam memahami etika pemerintahan dalam tata pemerintah.³

Studi tentang kepemimpinan nabi muhammad sebagai model etika pemerintahan dalam tata pemerintah ada tiga literatur. Misalnya artikel M. Basyir Syam, yang membahas tentang “kebijakan dan prinsip kenegaraan nabi muhammad saw di madinah” Dalam mengkaji prinsip sistem perundang-undangan dan politik islam, seperti musyawarah, persamaan, keadilan, kebebasan, wewenang dan tanggung jawab. Dalam aspek politik selain membawa ajaran, juga beliau melakoni sebagai praktisi, memimpin negara. Jika dibandingkan dengan bentuk pemerintahan yang ada di zaman modern, pemerintahan beliau lebih bercorak demokratis, suatu hal yang menakjubkan bagi para penulis sejarah politik.⁴ Kemudian, Misbah Hoiriah Hasibuan, dengan skripsinya yang berjudul “analisis pemikiran etika politik islam menurut ibnu khaldun (studi tokoh) dalam penelitian tersebut membahas tokoh pemikir

³ Zainal Arifin Syahrul Fauzi1, Nidaul Fajrin, “Karakteristik Kepemimpinan Rasulullah Dan Kepemimpinan Di Era Modern Dalam Bidang Pendidikan,” no. December (2021): 7–9.

⁴ Muhammad Basir Syam, “Kebijakan Dan Prinsip Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw Di Madinah (622-632 M),” *Kritis Jurnal Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1, no. 1 (2015): 157–74.

muslim Ibnu Khaldun tentang konsep etika baik dalam politik maupun pemerintahan.⁵ Kemudian, Hurin'in AM dengan skripsinya yang berjudul "Bahasa Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW" bahasa kepemimpinan yang ditemukan dalam bahasa nabi SAW. Lebih dominan ketika menggunakan bahasa dalam memberikan penghargaan dan ketentuan peraturan yang dibuat.⁶

Dari tiga literatur yang ada memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai etika pemerintahan namun berbeda di dalam fokus penelitiannya yaitu berfokus pada amanah dan akuntabilitas kepemimpinan, pemikiran etika politik, bahasa nabi SAW. Sedangkan yang saya tulis berfokus pada Kepemimpinan Nabi Muhammad Sebagai Model Etika Pemerintahan Dalam Tata Pemerintah.

Skripsi ini ingin menguji kepemimpinan nabi Muhammad sebagai model etika pemerintahan dalam tata pemerintah. dengan tiga tujuan utama yaitu untuk mengidentifikasi dan memahami konsep kepemimpinan nabi Muhammad, bagaimana prinsip-prinsip etika kepemimpinan nabi Muhammad SAW dapat diterapkan dalam tata pemerintahan, dan bagaimana model kepemimpinan nabi Muhammad SAW dalam tata pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat mengemukakan hipotesa awal bahwa model kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, yang mengutamakan

⁵ Misba Hoiriah Hasibuan, "Analisis Pemikiran Etika Politik Islam Menurut Ibnu Khaldun (Studi Tokoh)," *Repository.Unsu.Ac.Id* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), http://repository.uinsu.ac.id/15626/1/Skripsi_Misba.pdf.

⁶ Hurin'in AM, "Bahasa Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW," 2015, 3–5, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/26325>.

nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan pelayanan bagi rakyat, dapat dijadikan sebagai pedoman etika pemerintahan dalam tata pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip dasar konstitusi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjembatani kesenjangan antara nilai etika yang diharapkan dan implementasinya dalam pemerintahan Indonesia, serta memperkaya literatur tata pemerintah dengan pendekatan berbasis nilai-nilai etika universal dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dengan ini peneliti mengangkat judul “Kepemimpinan Nabi Muhammad Sebagai Model Etika Pemerintahan Dalam Tata Pemerintahan Negara Indonesia.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep kepemimpinan Nabi Muhammad SAW?
2. Bagaimana prinsip-prinsip etika kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dapat diterapkan dalam Tata Pemerintahan Negara Indonesia?
3. Bagaimana model kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam Tata Pemerintahan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan memahami konsep kepemimpinan Nabi Muhamad SAW.
2. Untuk menjelaskan prinsip-prinsip etika kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam Tata Pemerintahan Negara Indonesia.
3. Untuk menganalisis model kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam tata pemerintahan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang begitu besar bagi para pembaca. Adapun hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi serta dapat dijadikan wawasan keilmuan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk memahami lebih jauh mengenai kepemimpinan nabi muhammad sebagai model etika pemerintahan dalam tata pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

a. Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, pertama yang sangat diharapkan adalah ilmu ini dapat ilmu yang bermanfaat dan barokah dalam kehidupannya. Menjadikannya sebuah pengalaman dan pelajaran untuk mengembangkan pengetahuan dan memperoleh wawasan yang lebih baik dari sebelumnya. Terutama dalam memperdalam bacaan dan referensi mengenai etika pemerintahan, sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam segi praktek, peneliti bisa menerapkan dan memiliki bekal untuk menjalankannya. Jika tidak demikian berharap peneliti dapat menjadikan ilmu ini bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

b. Masyarakat

Peneliti sangat berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi lebih bagi masyarakat yang kurang memahami mengenai hal-hal yang berhubungan dengan etika pemerintahan. Hal ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat agar mengetahui lebih jauh kepemimpinan nabi muhammad sebagai model etika pemerintahan dalam tata pemerintahan negara indonesia.

c. IAIN Madura

Dengan adanya penelitian ini, peneliti sangat berharap semoga penelitian ini menjadi tambahan bacaan, referensi dan pandangan yang lebih dalam tentang karya ilmiah di perpustakaan IAIN Madura. Sehingga, dapat dijadikan perbandingan dan acuan terhadap para mahasiswa yang mmbutuhkannya, untuk menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. penelitian ialah sebuah proses ilmiah untuk mendapatkan data untuk digunakan keperluan penelitian.⁷

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah Jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma, aturan, dan prinsip dalam suatu

⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: alfabeta,2012),5

bidang, terutama hukum, etika, atau sosial. Tujuannya adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi standar-standar yang ada, menggunakan studi kepustakaan (*library reseach*). Penelitian ini lebih menuntut kejelasan penelitian serta sangat menekankan terhadap aspek analisa dan kajian teks. Dengan itu, penulis menggali sumber informasi melalui buku, jurnal, artikel dengan memandang, membaca, dan mendokumentasikan, mengumpulkan, menganalisa, dan merumuskan kalimat-kalimat yang ada.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti ini menggunakan pendekatan konsep (*Konseptual approach*) dan pendekatan historis (*Historical approach*). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami konsep kepemimpinan Nabi Muhammad SAW serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan model etika pemerintahan dalam tata negara. Pendekatan konseptual memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis konsep-konsep teoretis, prinsip-prinsip etika, dan norma-norma yang terdapat dalam literatur yang relevan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menggali secara mendalam tentang bagaimana nilai-nilai dan etika kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dapat diterapkan dalam praktik pemerintahan modern. Pendekatan historis digunakan untuk memahami konteks sejarah dan latar belakang Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.

3. Jenis data

Dalam penelitian ini, ada dua data yang digunakan, jenis data sekunder dengan 2 bahan hukum:⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah jenis data yang menjadi data utama dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer ada dua yaitu seni kepemimpinan ala nabi dan etika pemerintahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data penunjang dari bahan hukum primer dan menjelaskan maksud-maksud yang ada dalam bahan hukum primer yang diperoleh melalui buku, jurnal, hasil penelitian, makalah, artikel internet, sejarah-sejarah atau catatan-catatan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan konsep kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, etika pemerintahan dalam Islam, dan Fiqih Tata Negara.

4. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan sumber hukum primer dan sekunder adalah dengan mengumpulkan beberapa dokumen literatur. Hal ini dilakukan dengan membaca, merangkum dan menganalisis. Dokumen literatur tersebut kemudian dipahami dan ditelaah untuk dapat merangkai suatu penelitian

⁸ Tim Penyusun, *Panduan Teknis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2024).36

dari awal sampai kesimpulan. Dokumen literatur tersebut harus relevan dengan judul penelitian yang membahas mengenai kepemimpinan nabi muhammad sebagai model etika pemerintahan dalam fiqih tata negara indonesia, seperti buku, jurnal, tulisan hasil penelitian, makalah, majalah, artikel internal, website dan sejarah atau catatan yang menjadi data pendukung dalam penelitian ini.⁹

5. Metode pengolahan data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahapan untuk memperoleh data dengan hasil yang maksimal. Tahap yang pertama yaitu pemeriksaan data (*editing*), hal ini dilakukan dengan memeriksa data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Setelah melalui tahap pemeriksaan maka data-data tersebut menuju pada tahapan kedua yaitu tahap klasifikasi (*classifying*), maksudnya data yang telah diperiksa kemudian dipilah-pilah atau disusun sesuai dengan pengelompokannya. Tahap selanjutnya yang merupakan tahap ketiga adalah tahap verifikasi (*verifying*), yaitu pemeriksaan kembali semua data-data yang telah melalui tahapan sebelumnya untuk memastikan keabsahan data tersebut, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Tahap yang keempat yaitu tahap analisis (*analysing*), data-data tersebut kemudian dianalisis, diperiksa sehingga memperoleh suatu data atau pemikiran yang baru. Hal ini bertujuan untuk menyajikan data dengan penyampaian yang mudah dimengerti dan menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di penelitian ini.

⁹ Tim penyusun, *panduan praktis penulisan karya ilmiah fakultas syariah*, 37

Tahap terakhir yaitu tahap kesimpulan (*concluding*), dalam tahapan ini berisi kesimpulan dari semua tahapan sebelumnya yaitu tahap *editing*, *classifying*, *verifying* dan *analysing*.¹⁰

6. Penelitian terdahulu

Pada bagian ini, peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai bahan rujukan atau perbandingan dalam peneliti ini, yaitu sebagai berikut:

- a. M. Basyir Syam, dengan penelitian yang berjudul “*Kebijakan dan Prinsip-prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad SAW di Madinah (622-632 M) (Tinjauan Perspektif Pemikiran Islam)*”.¹¹ Penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip sistem perundang-undangan dan politik Islam, seperti musyawarah, persamaan, keadilan, kebebasan, wewenang, dan tanggung jawab. Fokusnya adalah pada amanah dan akuntabilitas kepemimpinan. Artikel ini juga membahas kebijakan dan prinsip kenegaraan Nabi Muhammad SAW di Madinah yang demokratis, serta pengakuan beberapa penulis Barat akan keberhasilannya. Selain itu, penelitian ini menyoroti tanggung jawab pemimpin berdasarkan kontrak politik dan syariat Islam, serta Dustur Madinah sebagai konstitusi pertama yang menghargai keberagaman dan kebebasan beragama.

¹⁰ Tim penyusun, *panduan praktis penulisan karya ilmiah fakultas syariah*, 37

¹¹M.Basyir Syam, “Kebijakan Dan Prinsip Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw Di Madinah (622-632 M).”

- b. Misba Hoiriah Hasibuan, dengan skripsi yang berjudul “*Analisis Pemikiran Etika Politik Islam Menurut Ibnu Khaldun (Studi Tokoh)*”.¹² Penelitian ini membahas tentang tokoh pemikir Muslim yaitu Ibnu Khaldun tentang konsep politik yaitu etika politik islam. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa kedudukan penguasa adalah kedudukan yang terhormat dan diperebutkan, karena memberikan kepada orang yang memegang kedudukan itu segala macam kekayaan duniawi dan kepuasan lahir batin.
- c. Hurin'in AM, “*Bahasa Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW*”¹³ penelitian ini menyampaikan bahwa Nabi SAW. Adalah seorang pemimpin yang bisa dibuktikan melalui bahasa yang digunakan. Bahasa kepemimpinan yang ditemukan dalam bahasa Nabi SAW. Lebih dominan ketika menggunakan bahasa dalam memberikan penghargaan dan ketentuan peraturan yang dibuat.

No	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	M. Basir Syam	Kebijakan dan Prinsip-prinsip kenegaraan Nabi Muhammad SAW di Madinah (622-632 M) (Tinjauan Perspektif	fokus kajian yang berbeda, penelitian ini menyoroti hubungan antar kelompok masyarakat dan perlindungan daerah, sedangkan penelitian yang	Penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dalam hal mengkaji peran Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara dan praktek kenegaraan yang bersifat

¹² Misba Hoiriah Hasibuan, “Analisis Pemikiran Etika Politik Islam Menurut Ibnu Khaldun (Studi Tokoh).”

¹³ Hurin'in AM, “Bahasa Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.” 2015,3-5

		Pemikiran Politik Islam)	akan dilakukan lebih menekankan pada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai model etika pemerintahan dalam konteks hukum tata negara yang demokratis	demokratis. Keduanya juga menggunakan pendekatan library research untuk menganalisis pemikiran politik Islam dan fakta historis terkait Nabi Muhammad SAW dalam konteks pemerintahan.
2	Misba Hoiriah Hasibuan	Analisis Pemikiran Etika Politik Islam Menurut Ibnu Khaldun (Studi Tokoh)	Fokus kajian penelitian ini adalah pemikiran etika politik sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada kepemimpinan Nabi Muhammad sebagai model etika pemerintahan.	Sama sama menggunakan pendekatan library research dan membahas etika baik dalam politik maupun pemerintahan.
3	Hurin'in AM	Bahasa Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.	Penelitian ini membahas tentang bahasa kepemimpinan nabi sedangkan penelitian yang akan datang membahas tentang etika kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.	Sama sama menggunakan penelitian pustaka dan membahas kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.

7. Sistematika pembahasan

Guna untuk mengetahui isi pembahasan ini secara general dan menyeluruh, maka peneliti berusaha merumuskan isi pembahasan proposal skripsi ke dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu sebagai berikut:

BAB I, bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan dan definisi istilah.

BAB II, bab ini berisi tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk meneliti masalah yang diambil, yang berisi tentang pembahasan dan informasi yang berhubungan dengan judul penelitian ini yaitu tentang Kepemimpinan Nabi Muhammad Sebagai Model Etika Pemerintahan dalam Tata Pemerintahan Negara Indonesia. Tujuan dari tinjauan teori ini adalah untuk dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat memaparkan gambaran singkat dengan beberapa kajian pustaka.

BAB III, bab ini berisi tentang pemaparan data-data dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Kepemimpinan Nabi Muhammad Sebagai Model Etika Pemerintahan dalam Tata Pemerintahan Negara Indonesia . Data-data tersebut diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian dibenahi, diklasifikasi, diverifikasi dan dianalisa untuk memberikan jawaban dari setiap rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini.

BAB IV, bab ini berisi tentang bagian akhir (penutup), yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan dari semua pembahasan dalam penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti dalam penelitiannya, sedangkan saran berisi solusi dan harapan dari peneliti terhadap hasil penelitiannya.

8. Definisi Operasional

Pada bagian ini, peneliti memberikan penjelasan singkat mengenai beberapa istilah yang erat kaitannya dengan judul penelitian. Langkah ini diambil untuk menghindari kesalahpahaman atau interpretasi yang salah terhadap judul penelitian. Oleh karena itu, istilah-istilah yang dianggap penting akan dijelaskan disini. Berikut adalah beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini:

- a. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW : Cara Nabi Muhammad SAW memimpin umatnya dengan prinsip-prinsip yang diajarkan Islam.
- b. Etika Pemerintahan : Norma dan nilai moral yang harus dipatuhi oleh pemimpin dalam menjalankan tugas pemerintahan.
- c. Tata Pemerintahan : sistem atau mekanisme penyelenggaraan kekuasaan dan pengelolaan urusan negara yang meliputi struktur, fungsi, proses, dan hubungan antar lembaga pemerintahan serta hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa “Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai Model Etika Pemerintahan Dalam Tata Pemerintahan Negara Indonesia” berarti mengadopsi cara dan prinsip

kepemimpinan Nabi Muhammad yang berbasis pada nilai-nilai moral Islam. Prinsip-prinsip ini digunakan untuk membimbing pemimpin pemerintahan modern dalam menjalankan tugas mereka dengan adil dan berintegritas. Dalam tata pemerintahan mengatur bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya dalam mengelola sumber daya, membuat kebijakan, melaksanakan hukum, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel. model ini bertujuan menciptakan pemerintahan yang etis, transparan, dan berlandaskan pada ajaran Islam.